

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH INKLUSIF DALAM KONTEKS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 4 SIDOARJO)

Atsna Nur Hasanah

Prodi Manajemen Pendidikan FIP Universitas Negeri Surabaya

atsnanaa@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dalam sebuah sekolah, tidak terkecuali di sekolah inklusif. Salah satu bagian terpenting dari masyarakat tersebut adalah orang tua siswa. Dukungan orang tua bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sangat dibutuhkan, karena sebagian besar aktivitas anak membutuhkan pendampingan, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran baik di rumah atau bahkan di sekolah, sehingga orang tua yang paling memahami dan mengerti bagaimana kondisi anak. Besarnya partisipasi tersebut perlu ditunjang adanya transparansi dan akuntabilitas sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan. MBS merupakan sistem manajemen sekolah yang mewadahi setiap bentuk keterlibatan orang tua di sekolah dan menjadi prasyarat utama bagi sekolah inklusif. Berdasarkan pada temuan awal peneliti, menunjukkan bahwa selama ini sekolah yang diteliti memiliki cara tersendiri untuk dapat meningkatkan partisipasi orang tua PDBK dalam serangkaian kegiatan program pembelajaran mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Berdasarkan temuan awal tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pembelajaran pada sekolah inklusif dalam konteks MBS di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pembelajaran pada sekolah inklusif dalam konteks MBS di sekolah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Koordinator Pendidikan Inklusif, komite sekolah, dan orang tua siswa PDBK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa; (1) pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi orang tua cukup tinggi, mereka dilibatkan dalam serangkaian kegiatan yang terdiri dari asesmen awal di sekolah oleh tim pendidikan inklusif, proses identifikasi di psikolog RSUD Kabupaten Sidoarjo, dan pemberian seluruh informasi diri anak dalam proses pendaftaran di sekolah. Namun, selama proses penyusunan program pembelajaran (RPP/PPI) orang tua tidak terlibat secara langsung, sekolah hanya memberikan sosialisasi kepada seluruh orang tua siswa baru; (2) pada tahap pelaksanaan, partisipasi diwujudkan dalam bentuk forum orang tua PDBK yang disebut Paguyuban Orang Tua Inklusif serta pendampingan dalam proses pembelajaran di rumah. Bentuk keterlibatan dalam Paguyuban melalui pendanaan dalam pelaksanaan pembelajaran yang dialokasikan untuk gaji GPK dan keaktifan dalam rapat rutin, selain itu orang tua juga mendampingi PDBK dalam pembelajaran di rumah sesuai dengan program pembelajaran di sekolah; dan (3) pada tahap monitoring dan evaluasi, orang tua berpartisipasi melalui konseling dengan GPK dan rapat evaluasi program pembelajaran di sekolah.

Kata kunci: *partisipasi masyarakat, pengelolaan program pembelajaran, sekolah inklusif, manajemen berbasis sekolah*

ABSTRACT

Parent's participation has a very big role to the successful implementation of the learning programme in a school, also in the inclusive school. Parent support for students with special needs (PDBK) is needed, since most of the activities of students are needs of assistance, not least in the learning process at home or even at school, so that parents who most appreciate and understand how the child's condition. Their participation should be supported by transparency and accountability of school as a form of accountability for the trust that has been given. School-based management is a school management system that supports any form of parental involvement in school, and become a prerequisite for an inclusive school. Based on the initial findings of the researchers, indicate that during this time the school investigated has its own way to increase parent participation in a series of student's learning programs begin the planning, implementation, and evaluation. Based on preliminary findings, the researchers took the focus of research on parent's participation in the management of learning programs in inclusive schools in the context of MBS in SMP Negeri 4 Sidoarjo. Thus, this study aims to determine and describe how parent's participation in the management of learning programs in inclusive schools in the context of MBS in schools.

Source of data in this study is the Principal, Vice Principal of Curriculum, Coordinator of Inclusive Education, the school committee, and parents of PDBK. The method used is descriptive qualitative method

through case studies. Data collection is done through interviews, observation, and documentation study. Results of the study found that; (1) the planning stage, the level of parent participation is high enough, they are involved in a series of activities consisting of the initial assessment at the school by a team of inclusive education, the identification process in Sidoarjo District Hospital psychologist, and registration of prospective students in school. However, during the process of preparing the learning program (RPP/PPI) parents are not involved directly, the school only gives training to all parents of new students; (2) the implementation stage, manifested in the form of participation of parents PDBK forum called by *Paguyuban* of parents for inclusive and assisting in the learning process at home. The involvement of the *Paguyuban* through the implementation of learning funding allocated to salaries shadow teacher (GPK) and liveliness in scheduled meeting, as well as parents accompany PDBK in learning at home in accordance with the learning programs in schools; and (3) the stage of monitoring and evaluation, the parents through counselling with teachers and program evaluation of meeting learning in school.

Keywords: *parent's participation, learning program management, inclusive school, school-based management*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, selanjutnya pada ayat 2 juga disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Warga negara yang dimaksud di sini adalah seluruh warga Indonesia, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus (ABK) dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini sejalan dengan seruan UNESCO dalam *International Education for All* (EFA) sebagai kesepakatan global yaitu *World Education Forum* di Dakar, Senegal pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa penuntasan EFA diharapkan terjadi pada tahun 2015 (Mudjito, dkk 2013: 14).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut telah meratifikasi dalam kebijakan Wajib Belajar 9 tahun yang dijabarkan dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 32 mengatur tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin sepenuhnya pendidikan bagi setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu.

Sebagaimana tersurat pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya dinyatakan pada pasal 2 bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Implementasinya dijabarkan dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah mewujudkan

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Hal ini mengindikasikan pemerintah memberikan perluasan akses dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, salah satunya melalui pendidikan inklusif, yakni anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler bersama dengan anak normal lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Mudjito, dkk 2013: 15). Perluasan kesempatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka perbaikan mutu pendidikan di negara kita.

Hasil survei Direktorat PSLB tahun 2010 menunjukkan, angka anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) usia 5-18 tahun adalah sebesar 21,42% dari jumlah anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kelainan, yaitu sebesar 330.764 anak. Angka ABK yang sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa) atau Sekolah Inklusi, dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Pertama hanya sebanyak 85.737 anak (25,92%). Artinya, ada sebanyak 245.027 anak (74,08%) berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis kelainan dan sebagian besar dari mereka berada di daerah pedesaan (Direktorat Pembinaan PKLK, 2013: 15). Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam pemerataan pendidikan, prevalensi anak berkebutuhan khusus lebih besar dari pada sekolah penyedia layanan pendidikan khusus. Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak

berkebutuhan khusus yang belum memperoleh hak pendidikan.

Berdasarkan realita tersebut, pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan di Indonesia melalui pemberian wewenang pada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa urusannya sendiri secara mandiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya mengenai pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengamanahkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 undang-undang tersebut, kewenangan yang diberikan mencakup semua bidang pemerintahan, termasuk salah satunya pendidikan. Sebelumnya pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat (sentralistik), kini dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini mengindikasikan, terjadi perubahan sistem pendidikan dari yang semula terpusat (sentralistik) menjadi desentralistik.

Desentralisasi pendidikan ditandai dengan adanya pendelegasian wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejalan dengan adanya semangat otonomi daerah, Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 juga telah mengamanatkan wewenang pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah kota/kabupaten menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya peraturan tersebut, maka diharapkan kualitas pendidikan di negara kita, utamanya bagi anak berkebutuhan khusus dapat ditingkatkan.

Sebagai upaya peningkatan tersebut, pemerintah menasar aspek terkecil (mikro) yang melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah (Mulyasa, 2007: 11). Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebagai implikasi dari adanya upaya ini, sekolah diberikan otonomi lebih luas dalam rangka mengelola dan memajukan sekolahnya. Upaya

peningkatan mutu berbasis sekolah ini melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan sekolah (Suwandi, 2006: 3). Jadi sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola beberapa urusannya. Penyesuaian manajemen yang lebih kondusif merupakan implikasi adanya otonomi yang diberikan kepada sekolah.

Pengkondisian sistem dan manajemen sekolah ini merupakan suatu keharusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 ayat 1 menyebutkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pasal 10 ayat 4 yang berbunyi: "Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai SNP secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah". Selanjutnya Peraturan Pemerintah Daerah/Kabupaten Nomor 15 Tahun 2006 juga menyebutkan bahwa "Setiap sekolah harus sudah menyelenggarakan pengelolaan sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)". Hal ini menunjukkan bahwa MBS merupakan suatu keharusan bagi setiap sekolah. Demikian halnya sekolah inklusif, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kekhususan sendiri-sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam tersebut, maka sekolah perlu dikelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing.

Setting sekolah inklusif mengharuskan sistem sekolah menyesuaikan kondisi anak. Stubb (2002:8) menyatakan bahwa cara pandang dalam pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi dan model sosial. Pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan, merupakan sistem pendidikan yang tidak melihat hambatan dari sisi anak/peserta didik yang memiliki kelainan, namun sistem pendidikan yang harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Karena itulah diperlukan modifikasi kurikulum, sarana dan prasarana, guru dan komponen lain yang mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga mampu mengatasi setiap hambatan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi itu semua, sekolah perlu diberikan kewenangan dalam mengatur beberapa urusannya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Tanpa adanya otonomi ini, sekolah

inklusif akan kesulitan dalam melaksanakan layanan pendidikan yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan alternatif bagi konsep pemberian wewenang pada sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah menurut Caldwell (2005) adalah suatu desentralisasi yang tersistem pada level sekolah mengenai otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan mengenai perihal yang penting terkait pelaksanaan sekolah dalam menentukan kerangka tujuan, kebijakan, kurikulum, standar dan akuntabilitas sekolah. Selanjutnya menurut Fattah dan Ali (2005: 2) inti dari MBS adalah memberikan kewenangan dan pendelegasian wewenang (*delegation of authority*) kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*quality continuous improvement*). Demikian halnya dengan sekolah inklusif. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Direktorat PPK-LK, 2011) menyebutkan, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dalam pengelolaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut:

“(1) Sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian, baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana serta penataan lingkungan; dan (5) Guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran di sekolah.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka sekolah inklusif juga perlu menerapkan MBS. MBS memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang akan menjadi tanggung jawab pemerintah (Mulyasa, 2007: 11).

Konteks dari MBS sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 49 ayat 1 adalah dalam rangka membentuk sekolah yang menerapkan MBS dengan ditandai adanya

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat kita identifikasi pilar besar dalam MBS, yaitu mutu, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pada penelitian ini, peneliti sengaja mengambil salah satu dari pilar tersebut yakni partisipasi, karena partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi sebuah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Salah satu ciri khas dari MBS adalah pengambilan keputusan secara partisipatif (Abu Dohou, 2002: 33), oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan desentralisasi pendidikan (Mulyasa, 2007:41). Pemberdayaan merupakan suatu upaya membangun daya atau potensi manusia dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadarannya akan potensi yang ia miliki serta upaya untuk mengembangkannya (Sufyarma dalam Nurbuati, 2008:3). Dengan demikian, sekolah harus mampu menampung semua aspirasi dan kondisi masyarakat.

Besarnya dukungan dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan diberlakukannya MBS di sekolah. Dalam konteks pendidikan, komponen masyarakat terdiri dari orang tua, masyarakat umum yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, dan lembaga sosial budaya, dan pemerintah (Wuriyanto, 2008:4). Orang tua sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak. Dukungan orang tua bagi anak berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan, karena sebagian besar aktivitas anak membutuhkan pendampingan, tidak terkecuali dalam pembelajaran, sehingga orang tua yang paling memahami dan mengerti bagaimana kondisi anak. Pada penelitian ini, difokuskan pada aspek partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran anak, mengingat orang tua merupakan *stakeholder* yang berhubungan secara langsung dengan anak sehingga memiliki keterlibatan yang sangat besar.

Keterlibatan orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Bentuk keterlibatan tersebut tidak hanya berupa dukungan finansial, namun dapat berupa dukungan tenaga, ide atau pemikiran, teknik atau mekanisme, dan modal (bisa berupa finansial, barang maupun jasa. Partisipasi melalui ide dapat tertuang dalam penyusunan RKAS yang ditampung melalui komite sekolah. Ide-ide ini dapat berupa masukan tentang program-program sekolah dan program pembelajaran di sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam *setting* pendidikan inklusif orang tua banyak dilibatkan dalam pembelajaran anak

berkebutuhan khusus. Orang tua siswa terlibat langsung dalam tahap awal penyusunan PPI. Program pembelajaran individual (PPI) merupakan program pembelajaran individu siswa yang disusun berdasarkan kemampuan, cara, dan kecepatannya sendiri (Dispenprov Jatim, 2013: 4), sehingga sangat dimungkinkan setiap anak berbeda dengan yang lainnya. PPI ini disusun di awal ketika siswa pertama kali mendaftar masuk sekolah berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa. Bentuk keterlibatan orang tua berupa informasi yang diberikan ketika siswa menjalani tahap asesmen di sekolah. PPI inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sangat bergantung kepada partisipasi aktif orang tua.

Partisipasi ini perlu didukung adanya keterbukaan dan akuntabilitas sekolah sebagai wujud pertanggungjawaban pada kepercayaan yang telah diberikan orang tua. PPI sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yang notabene sangat membutuhkan keterlibatan yang besar dari orang tua, perlu ditunjang dengan sistem yang menggerakkan seluruh *stakeholders* agar terlibat secara aktif. MBS dalam hal ini dinilai sebagai *support system* yang paling tepat untuk diterapkan di sekolah inklusif. Dengan adanya keterlibatan aktif dari orang tua, maka sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk terbuka dan melaporkan setiap aktivitas terkait pembelajaran anak. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari pilar MBS, sehingga MBS dipandang mampu mengawal serta sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan PPI di sekolah inklusif.

SMP Negeri 4 Sidoarjo merupakan salah satu sekolah inklusif yang melaksanakan sistem manajemen menggunakan MBS. Sebagai sekolah negeri yang ditunjuk pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, kini sekolah tersebut mampu menjadi sekolah inklusif percontohan di Sidoarjo. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di sekolah tersebut, sekolah yang beralamatkan di Kompleks Perumahan Puri Indah, Jalan Suko, Kecamatan Sidoarjo ini mulai menerima siswa berkebutuhan khusus sejak tahun 2009. Sampai saat ini terdapat 24 siswa yang tersebar di 27 rombongan belajar. Dengan fasilitas dan dukungan dari pemerintah daerah, SMP Negeri 4 Sidoarjo kini mampu mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan siswa reguler.

Sebagai sekolah inklusif yang menerapkan MBS, SMP Negeri 4 Sidoarjo merupakan sekolah yang mandiri dalam hal pembangunan fasilitas fisik dan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Sekolah yang dipimpin oleh Bapak MH sebagai Kepala Sekolah ini, mengalami perkembangan yang sangat pesat selama dua periode kepemimpinan beliau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 4 Sidoarjo menyatakan:

“Enam tahun lalu kondisi lingkungan sekolah ini kurang kondusif, Mbak. Namun kini, sekolah bisa sampai seperti ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adanya keterlibatan orang tua siswa. Mereka kita libatkan dalam rapat-rapat melalui komite sekolah. Sekolah bisa membangun masjid, aula, dan beberapa sarana yang lain, itu juga karena adanya dukungan dari orang tua, salah satunya melalui infaq siswa setiap harinya. Kami juga mengajarkan kepada siswa untuk selalu bersikap dermawan dan menghargai siswa lain yang berkebutuhan khusus”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wakasek Kurikulum SMP Negeri 4 Sidoarjo menyatakan, bahwa wali murid terlibat aktif dalam proses perencanaan awal pembelajaran bagi anak di sekolah. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakasek Kurikulum SMP Negeri Sidoarjo:

“Selama ini kami selalu berupaya meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan wali murid. Partisipasi tersebut telah berwujud dalam banyak hal, selain dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah, orang tua siswa ikut dalam proses asesmen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan PPI”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, nampak bahwa orang tua dilibatkan dalam perumusan program pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus (PPI). Dalam kaitannya penyusunan program pembelajaran tersebut, orang tua dilibatkan dalam proses identifikasi psikologis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo serta sebagai informan dalam proses asesmen mengenai peserta didik. Khusus bagi orang tua dari siswa kelas VII yang anaknya merupakan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Sidoarjo, sekolah memberikan sosialisasi di awal tahun ajaran baru ketika siswa telah diterima di sekolah. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya sekolah untuk mengenalkan orang tua mengenai pendidikan inklusif, kebijakan-kebijakan di sekolah, serta sebagai wujud keterbukaan sekolah kepada orang tua mengenai pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang akan dilaksanakan di sekolah nantinya.

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini selain dipengaruhi kualitas guru yang

berkompeten, menurut Bapak G, dari 49 guru di sekolah tersebut seluruhnya telah mendapatkan pelatihan mengenai pendampingan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas meskipun tanpa didampingi oleh GPK. Di sisi lain, pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini juga didukung adanya kesadaran orang tua siswa akan kualitas pendidikan yang lebih baik, yakni nampak dari antusiasme orang tua siswa dalam keterlibatannya membangun sekolah melalui pendanaan dan memberikan ide-ide. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan dengan adanya pembangunan aksesibilitas fisik untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, seperti perlengkapan *ram* di beberapa sudut sekolah, Kantin *Pink* yang sehat, dan ketersediaan sarana pembelajaran di ruang sumber.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Koordinator Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo, Bapak G menyatakan bahwa sekolah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mensukseskan program pendidikan inklusif di sekolah serta menjalin hubungan silaturahmi dengan orang tua siswa. Sebagai bentuk upaya tersebut, salah satunya sekolah membentuk komunitas orang tua peserta didik berkebutuhan khusus, yakni *Paguyuban* Orang Tua Siswa Inklusif yang berdiri pada tahun 2010, setahun setelah sekolah ditunjuk sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah daerah.

Komunitas ini berfungsi untuk mewadahi aspirasi dan konsultasi orang tua siswa mengenai peserta didik berkebutuhan khusus. Keberadaan komunitas orang tua inklusif tersebut, sangat membantu keberlangsungan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus secara tidak langsung, yakni melalui *support* dana pembelajaran. SMP Negeri 4 Sidoarjo merupakan sekolah yang mandiri dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Sekolah ini melakukan sistem pendanaan mandiri melalui dana sukarela dari orang tua siswa. Dana tersebut tertampung melalui *paguyuban* orang tua siswa.

Paguyuban ini, menurut Bapak G rutin melakukan pertemuan beberapa waktu sekali untuk sekedar *sharing* perkembangan anak. Bapak G menambahkan, *paguyuban* merupakan sarana efektif bagi orang tua peserta didik berkebutuhan khusus untuk aktif mengontrol perkembangan anaknya. Orang tua difasilitasi untuk melakukan konsultasi dengan guru mengenai perkembangan perilaku dan akademik peserta didik. Konsultasi dilakukan secara terjadwal maupun non formal, yakni melalui komunikasi telepon dengan guru. Hal ini menunjukkan bahwa

orang tua ikut berperan dalam monitoring perkembangan anak. Melalui monitoring perkembangan tersebut, sekolah dapat menilai sejauh mana keberhasilan program pembelajaran yang diberikan kepada anak, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan satu semester sekali dengan menghadirkan beberapa perwakilan orang tua siswa.

Sementara itu, bagi peserta didik berkebutuhan khusus, proses monitoring berguna untuk memantau sejauh mana perkembangan akademik dan perilakunya. Dengan demikian sekolah dapat segera mengetahui setiap gejala yang muncul dari anak dan mengevaluasi program yang diberikan. Hal ini menunjukkan dukungan orang tua yang sangat besar kepada sekolah dalam memberikan pelayanan yang bermutu.

SMP Negeri 4 Sidoarjo merupakan sekolah yang memiliki segudang prestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar pendidikan inklusif Jawa Timur, Dr. B, SMP Negeri 4 Sidoarjo selain menjadi sekolah percontohan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo, juga memiliki segudang prestasi yang membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya *Inclusive Award* pada Desember tahun 2014 lalu. Prestasi lainnya adalah SMP Negeri 4 Sidoarjo telah berhasil memenangkan Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional pada tahun 2014. Ketercapaian ini berkat adanya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan fasilitas sekolah, hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan sekolah yang semula kurang kondusif menjadi sekolah sehat.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 4 Sidoarjo untuk melihat bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Di samping itu, berdasarkan pengamatan peneliti, sejak tahun 2009-2015 belum ada penelitian mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS pada sekolah inklusif di lingkungan Prodi Manajemen Pendidikan, sehingga penelitian ini urgent untuk dilaksanakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan MBS yang baik melalui partisipasi masyarakat.

Melihat urgensi dari penelitian ini, maka peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pembelajaran pada Sekolah Inklusif dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri 4 Sidoarjo).**”

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pembelajaran pada sekolah

inklusif dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 4 Sidoarjo, dengan subfokus: (1) partisipasi orang tua dalam perencanaan kegiatan pembelajaran melalui penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) di SMP Negeri 4 Sidoarjo; (2) partisipasi orang tua dalam pelaksanaan program pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo, yang meliputi paguyuban orang tua siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di rumah; serta (3) partisipasi orang tua dalam monitoring dan evaluasi program pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pembelajaran pada sekolah inklusif dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 4 Sidoarjo dalam hal; (1) partisipasi orang tua dalam perencanaan kegiatan pembelajaran melalui penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) di SMP Negeri 4 Sidoarjo; (2) partisipasi orang tua dalam pelaksanaan program pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo, yang meliputi paguyuban orang tua siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di rumah; serta (3) partisipasi orang tua dalam monitoring dan evaluasi program pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo.

B. METODE

1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian menurut Satori (2012:3) merupakan suatu aktivitas yang menggunakan kekuatan pikir dan aktivitas dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memecahkan suatu persoalan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan metode yang sistematis dan ilmiah sehingga bisa dikatakan sebagai penelitian.

Agar tujuan penelitian tercapai, diperlukan prosedur ilmiah yang disebut dengan metode penelitian. Sugiyono (2013: 6) menyatakan metode penelitian sebagai:

“Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.”

Untuk mendapatkan gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelajaran anak

berkebutuhan khusus, tidak bisa diukur dengan angka atau hanya disimpulkan menggunakan tabulasi numerik, akan tetapi diperlukan rincian secara deskriptif untuk menemukan tujuan penelitian, sehingga dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di lokasi penelitian. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang berlangsung saat ini maupun yang telah lalu (Sukmadinata, 2012:54). Melalui penelitian deskriptif dikaji apa yang terjadi, bagaimana bentuk aktivitasnya, hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain, bagaimana persamaan dan perbedaan suatu fenomena dengan fenomena lain. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena apa adanya tanpa rekayasa. Dalam penelitian ini dikaji bagaimana proses bentuk-bentuk beserta mekanisme partisipasi orang tua siswa terhadap pelaksanaan manajemen sekolah inklusif yang mandiri.

Sementara itu, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), karena peneliti telah menentukan permasalahan dan fokus penelitian dalam proposal sebelum terjun ke lapangan, yaitu bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di sekolah inklusif. Selain itu, studi kasus tepat digunakan dalam penelitian ini, hal ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata (2012) bahwa sesuatu dapat dijadikan sebagai suatu kasus biasanya karena ada masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, akan tetapi tetap bisa dijadikan suatu kasus meskipun tidak ada masalah, namun karena memiliki suatu keunggulan atau suatu keberhasilan yang dicapainya.

Menurut Bogdan dan Biklen (2003: 55) bahwa penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: (1) studi kasus tentang suatu organisasi atau *Historical Organizational Case Studies*; (2) studi kasus dengan observasi atau *Observational Case Studies*; dan (3) sejarah hidup atau *Life History*. Bogdan dan Biklen (2003) menambahkan, tipe pertama dilakukan dengan memilih suatu organisasi tertentu yang diteliti dan diamati dalam waktu yang lama dan dengan pengamatan yang mendalam. Peneliti disyaratkan mengamati serangkaian perkembangan yang ditunjukkan

organisasi tersebut secara detail mulai mengapa dan bagaimana berdirinya, prosesnya, hingga perkembangan terakhir dari organisasi tersebut. Tipe kedua adalah studi kasus dengan observasi, sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan data utama adalah mengobservasi partisipan (baik interview secara formal ataupun informal dan review dokumen) dan menjadi fokus studi adalah suatu organisasi tertentu (seperti sekolah atau pusat rehabilitasi) ataupun suatu aspek dalam organisasi tersebut. Beberapa hal yang dapat dijadikan fokus dari organisasi tersebut di antaranya: (a) tempat-tempat tertentu dalam suatu organisasi, seperti ruang kelas, ruang guru, atau kantor kepala sekolah; (b) kelompok spesifik dari sekelompok orang, seperti tim basket sekolah, tim KKG guru, dll.; ataupun (c) beberapa aktivitas dari suatu sekolah, seperti perencanaan kurikulum dan masa penerimaan siswa baru. Selanjutnya tipe ketiga adalah penelitian yang dilakukan terhadap satu orang secara mendalam untuk mengumpulkan data-data diri tentang individu yang diteliti.

Berdasarkan pemaparan teori dari Bogdan dan Biklen (2003) tersebut, maka penelitian ini dirancang menggunakan tipe “*observational case study*” atau penelitian studi kasus melalui observasi. Studi kasus yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah beberapa aktivitas yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Melalui pemilihan fokus dalam metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti berharap mampu mengangkat tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo.

2. Sumber Data dan Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini tidak menggunakan istilah populasi ataupun sampel, sehingga lebih tepatnya dalam penelitian ini disebut dengan sumber data dalam suatu situasi sosial (Satori, 2012:2). Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam (Sukmadinata, 2012: 101). Selanjutnya dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Satori (2011: 48) mengatakan *snowball sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan teknik secara berantai, teknik penentuan sampel yang semula kecil lama-lama membesar. Hal ini dilakukan seiring untuk dengan kebutuhan data kelengkapan data dan informasi, maka lama kelamaan akan

menggelinding membesar layaknya bola salju sampai data yang dibutuhkan benar-benar jenuh.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2013: 298). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Koordinator Pendidikan Inklusif, GPK, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa.

Selain informan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berupa arsip seperti Program Pembelajaran Individual (PPI), foto-foto situs tempat penelitian, dan catatan-catatan lain yang relevan.

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 4 Sidoarjo, beralamatkan di Kompleks Perumahan Puri Indah, Jalan Suko, Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab satu, bahwa pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan beberapa hal, secara garis besar sekolah telah melaksanakan tiga hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan dinilai memiliki aspek menarik serta unik dan urgent untuk diteliti.

Alasan lain peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut adalah, SMP Negeri 4 Sidoarjo telah menjadi sekolah percontohan dalam melaksanakan pendidikan inklusif dan mendapatkan *Inclusive Award* dari pemerintah pusat pada tahun 2014 lalu, serta mendapat penghargaan sebagai sekolah sehat pada tahun yang sama.

SMP Negeri 4 Sidoarjo memiliki 27 siswa berkebutuhan khusus dengan kategori autisme, tunarungu ringan, *slow learner*, tunadaksa, dan *low vision*. Penyebaran siswa berkebutuhan khusus tersebut tersebar dalam 27 rombel, sehingga masing-masing kelas terdapat satu orang siswa berkebutuhan khusus.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. Bagus tidaknya serta sukses dan tidaknya sebuah penelitian tergantung pada instrumen yang digunakan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2013: 305) bahwa dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi”.

Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Penelitian kualitatif tidak memiliki acuan instrumen yang baku, hal ini dikarenakan peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen penelitian. Namun, sebagai instrumen, peneliti harus memiliki beberapa kelebihan yang menjadi modal awal sebagai instrumen penelitian. Modal awal tersebut menjadi kekuatan utama peneliti dalam melaksanakan penelitian. Melihat pada pendapat tersebut, maka dapat difahami bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti dalam posisi yang cukup rumit. Selain sebagai pelaksana penelitian, dia juga menjadi instrumen yang menentukan baik tidaknya penelitian yang dia laksanakan. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Selanjutnya, perangkat-perangkat penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian di lapangan dapat dilihat pada panduan penelitian (*lampiran 1*). Dari panduan tersebut, selanjutnya peneliti menguraikan dalam bentuk perangkat-perangkat penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman observasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013: 308) adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan data. Lebih dari itu, perlu diketahui pula bahwa sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan juga instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013:305). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari mulai sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Stainback (Sugiyono, 2013:335) mengemukakan bahwa "*data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study, and understanding of interrelationship and concept in your data that hypotheses and assertions can be developed and evaluated*", artinya analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif.

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang "*grounded*". Nasution (Sugiyono, 2013: 336) menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti hanya berupaya melakukan analisis data hingga menghasilkan suatu data temuan yang dapat menguatkan suatu teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganut deskriptif naratif model Miles and Huberman (Sugiyono, 2013) yang meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

6. Uji Keabsahan Data

Satori (2011: 164) menyatakan penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan/kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam pengujian keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas (validitas internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji dependabilitas (reliabilitas), uji konfirmabilitas (obyektivitas).

Dalam pengujian keabsahan data penelitian ini, peneliti melakukan: 1) Uji kredibilitas, dengan cara meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan diskusi dengan teman sejawat.; 2) Pengujian dependability, dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini terdapat *auditor dependent* yaitu dosen pembimbing skripsi, Dr. Erny Roesminingsih, M. Si.; 3) Pengujian konfirmabilitas, Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas; dan 4) Uji transferabilitas,

Merupakan sebuah uji yang menguji hasil penelitian ini apakah dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas ini merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Perencanaan menjadi kegiatan terpenting dalam rangkaian suatu aktivitas, karena apabila salah dalam merencanakan sama artinya sedang merencanakan kesalahan. Demikian pula dengan perencanaan program pembelajaran bagi peserta didik di sekolah inklusif ini. Perencanaan pembelajaran di sekolah yang diteliti diawali dengan proses modifikasi kurikulum. Pada sekolah ini, kurikulum yang diberlakukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah kurikulum modifikasi. Menurut Budiyanto, et.all (2011), modifikasi berarti kegiatan merubah untuk disesuaikan, artinya bagian dari kurikulum yang dibuat untuk dapat mengakomodasi tujuan pembelajaran setiap peserta didik atau dikenal dengan istilah kurikulum akomodatif. Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi (Budiyanto, 2011), sehingga pada praktiknya, peneliti mengamati pihak sekolah melakukan penyesuaian pada beberapa aspek dalam kurikulum nasional sesuai dengan jenis kebutuhan setiap peserta didik berkebutuhan khusus. Artinya, sekolah memiliki kewenangan dalam memodifikasi kurikulum tersebut yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Cheng (Volansky dan Friedman, 2003: 37-38) mengenai paradigma baru yang menghargai individu dalam sistem manajemen sekolah, salah satunya disebut sebagai individualisasi, sebagai berikut:

“The major implication of individualization in education is maximizing motivation, initiative, and creativity of pupils and teachers in schooling, teaching, and learning through such measures as implementing individualized educational programs; designing and using individualized learning targets, methods, and progress schedules; encouraging students and teachers to be self-learning, self-actualizing, and self-initiating; meeting individual special needs; and developing

students’ contextualized multiple intelligences.”

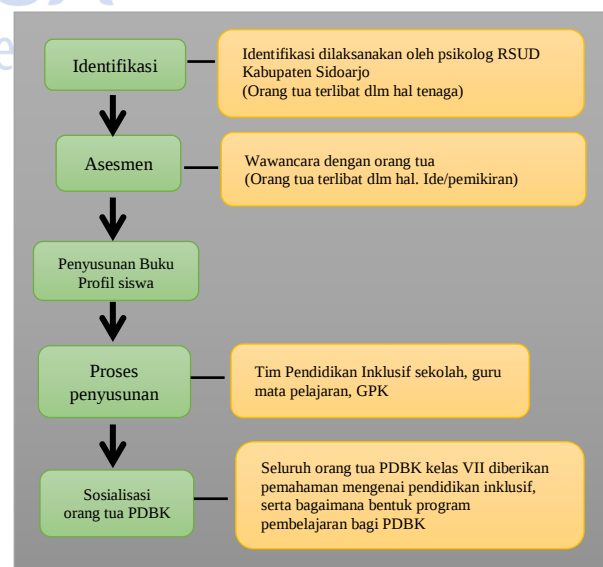
Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa sebagai sekolah yang menerapkan MBS, perlu menerapkan prinsip individualisasi dalam hal pembelajaran, yaitu melalui pengimplementasian program pembelajaran yang sifatnya individu, mendesain dan menggunakan target belajar yang diindividualkan, metode serta perkembangan belajar individu. Sehingga adanya modifikasi dalam kurikulum pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus merupakan suatu keharusan.

Modifikasi kurikulum ini dilakukan pada aspek tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Hal tersebut sebagai mana pendapat Loreman (2005) yang berpendapat bahwa:

“The careful and systematic structuring of appropriate goals for a child with diverse abilities through the adaptation and modification of the regular curriculum is viewed by many as an excellent method of providing an appropriate education while also allowing for inclusion in a regular class”.

Selama ini, pihak professional masih mempercayai bahwa modifikasi kurikulum sebagai salah satu upaya terbaik dalam merencanakan program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus agar dapat mencapai tujuan pembelajaran masing-masing.

Modifikasi kurikulum sangat perlu dilaksanakan, mengingat kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus berbeda-beda. Adapun proses modifikasi kurikulum yang dilakukan di SMP Negeri 4 Sidoarjo adalah sebagai berikut:

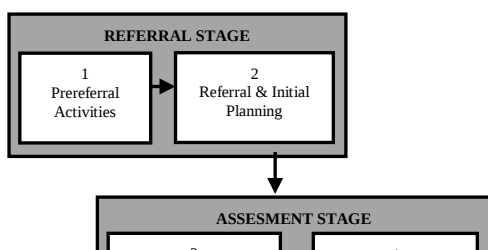


Gambar 5.1 Mekanisme Penyusunan PPI di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Salah satu tahap terpenting dalam memodifikasi adalah identifikasi dan asesmen calon peserta didik. Proses modifikasi diawali dengan proses identifikasi calon peserta didik. Hal ini dilakukan oleh psikolog dari RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk mengenali siapa dan bagaimana peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, apa jenis kekhususannya, serta bagaimana kemampuannya nanti, mampu atau tidak untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah inklusif atau tidak. Selanjutnya modifikasi kurikulum dimulai dari proses asesmen, yakni menemukan bagaimana kondisi peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini dapat dilakukan pihak sekolah melalui tim pendidikan inklusif yang juga terlibat dalam panitia penerimaan siswa baru. Melalui tahap ini, diperoleh berbagai informasi mengenai kelebihan dan kekurangan peserta didik berkebutuhan khusus, serta minat, dan bakat yang dimiliki.

Informasi tersebut selanjutnya dibukukan dalam bentuk profil siswa. Profil siswa memuat informasi yang dijadikan acuan dalam pembuatan Program Pembelajaran Individual (PPI). Informasi tersebut diperoleh melalui hasil wawancara awal dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus saat mendaftar di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Selanjutnya disusunlah program pembelajaran yang sifatnya sangat individual, karena antara satu anak dengan anak yang lain berbeda. Inilah yang dinamakan PPI atau program pembelajaran individual. PPI merupakan bentuk modifikasi dari kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan namanya, PPI dibuat untuk satu orang siswa saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Lerner dan Johns (2009:54) yang menyatakan: *“The IEP is written statement for each child with a disability, each IEP is designed for one student and should be a truly individualized document”* yang dimaknai bahwa PPI merupakan pernyataan secara tertulis untuk setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus, setiap PPI didesain untuk satu orang peserta didik dan seharusnya telah benar-benar diindividualisasikan, sehingga kebutuhan khas peserta didik tersebut dapat terangkum dalam satu dokumen dan dapat mendukung tujuan pembelajaran individu.

Proses perencanaan program pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 4 Sidoarjo tersebut sesuai dengan teori Lerner dan Johns (2009: 56) tentang proses penyusunan PPI sebagai berikut:



Gambar 5.2 Proses PPI menurut Lerner dan Johns
Sumber: Lerner dan Johns (2009:56)

Sesuai dengan temuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan modifikasi kurikulum di SMP Negeri 4 Sidoarjo sesuai dengan pendapat Lerner dan Johns (2009:56) dalam gambar tersebut meskipun terdapat beberapa perbedaan di beberapa aspek. Pada tahap *referral stage*, menurut peneliti ini sama dengan tahap persiapan dan tahap identifikasi yang dilakukan saat di rumah sakit. Karena pada proses tersebut Lerner dan Johns menyatakan bahwa aktivitas dalam tahap ini adalah *prereferral stage* yakni tahap awal menemukan anak melalui intervensi-intervensi tertentu, dan *referral and initial stage* yaitu pengenalan anak lebih dalam oleh tim ahli untuk mengidentifikasi secara mendalam jenis kekhususan anak. Analisis yang diberikan adalah secara akademik maupun perilaku, sehingga menurut peneliti hal ini dimaknai sebagai proses identifikasi calon PDBK di psikolog Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya tahap *assesment stage*, yakni tahap perumusan perlakuan yang tepat untuk anak. Pada tahap ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu *multidisciplinary evaluation*, yaitu proses asesmen anak yang membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak, seperti pihak orang tua dan sekolah, serta ahli multidisiplin ilmu, yakni proses perumusan program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Proses ini dimaknai oleh peneliti dengan proses asesmen yang dilakukan oleh tim pendidikan inklusif saat pendaftaran di sekolah, dan proses penyusunan buku profil siswa sehingga menghasilkan informasi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan PPI. Sementara itu proses *the IEP meeting – writing the IEP*, sesuai dengan tahap penyusunan program pembelajaran individual

(PPI) PDBK yang dilakukan oleh tim pendidikan inklusif dan guru mata pelajaran dalam forum yang menghasilkan dokumen PPI. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu *instruction stages* yang terdiri dari *implementing the IEP teaching plan* dan *review and reevaluation of the student's progress*. Tahap ini dimaknai sebagai proses pelaksanaan dan evaluasi PPI.

Keseluruhan proses tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sekolah dengan sosialisasi orang tua PDBK. Sosialisasi ini merupakan proses penyamaan *mindset* sekolah dengan orang tua. Dalam sosialisasi tersebut seluruh orang tua PDBK kelas VII diberikan pemahaman mengenai pendidikan inklusif, serta bagaimana bentuk program pembelajaran bagi PDBK, bagaimana evaluasinya, serta bagaimana pembiayaannya. Hal ini merupakan suatu upaya sekolah untuk mencapai kesepahaman dengan orang tua mengenai bagaimana memberikan pelayanan bagi PDBK. Dalam konteks MBS, sosialisasi tersebut dapat dipandang sebagai upaya sekolah untuk tetap terbuka kepada orang tua siswa, karena disampaikan pula bagaimana kondisi sebenarnya serta bagaimana menggandeng orang tua untuk bekerjasama dengan sekolah. Menurut Cheng (Nurkolis, 2003:126) terdapat dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. *Pertama*, pendekatan *school-based* dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. *Kedua*, pendekatan *home-based*, yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama dengan guru yang berkunjung ke rumah (Nurkolis, 2003:126). Jadi, pelibatan orang tua dalam forum tersebut merupakan salah satu upaya sekolah dalam memberdayakan orang tua untuk terlibat dalam proses pendidikan di sekolah.

Keseluruhan proses perencanaan tersebut juga membutuhkan adanya kerja sama dan keterlibatan dari orang tua. Pada tahap perencanaan awal, SMP Negeri 4 Sidoarjo membutuhkan keterlibatan dari orang tua siswa dalam proses identifikasi dan asesmen. Orang tua dilibatkan dalam hal: mendampingi saat proses identifikasi di psikolog rumah sakit dan mendampingi anak saat mendaftar di sekolah dan wawancara awal dengan tim pendidikan inklusif sekolah.

Keterlibatan yang pertama adalah mendampingi saat proses identifikasi di psikolog

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo. Merujuk pada pendapat Gargiulo (2012:68) yang mengatakan bahwa "*Parent(s)/guardian(s) must be sent written notification summarizing the evaluation and stating why their son or daughter is ineligible to receive a special education*". Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pada tahap awal perencanaan, seharusnya wali murid mendapatkan keterangan tertulis berdasarkan hasil evaluasi awal yang telah dilakukan. Keterangan tersebut menyatakan bahwa mengapa anak atau calon siswa dapat atau tidak dapat dilayani di sekolah inklusif. Hal ini sebenarnya telah dilakukan di lapangan, yakni saat melakukan identifikasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Setelah melakukan identifikasi di rumah sakit, orang tua akan menerima surat keterangan yang menerangkan jenis kekhususan anak serta mampu atau tidak untuk menerima pendidikan di sekolah inklusif atau tidak. Dari hasil identifikasi tersebut selanjutnya orang tua mendaftar di sekolah sambil membawa beberapa dokumen untuk dilampirkan.

Selanjutnya mendampingi PDBK saat mendaftar dan proses asesmen di sekolah. Asesmen merupakan tindak lanjut dari identifikasi yang bertujuan untuk memastikan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik dari berbagai aspek, seperti potensi intelektual, akademik, fisik/kesehatan (penglihatan, pendengaran, motorik), kondisi emosi/sosial/perilaku. Dalam proses ini dibutuhkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan orang tua siswa. Hasil dari asesmen dicatat dalam lembar laporan hasil asesmen peserta didik berkebutuhan khusus, sebagai bahan pertimbangan sekolah untuk pilihan penempatan program pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Keterlibatan orang tua dalam hal ini terkategori dalam bentuk ide/pemikiran, karena informasi tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun PPI. Keseluruhan keterlibatan orang tua tersebut untuk mendukung data tentang pribadi anak, sebagaimana pendapat Gargiulo (2012:66) bahwa:

"One of the goals of the assessment process is to obtain a complete profile of the student's abilities and his or her needs. By law (IDEA), this requires the use of a multidisciplinary team of professionals, of which one member must be a teacher. In practice, some school districts are

fulfilling this mission by establishing inter and transdisciplinary assessment teams.”

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa informasi yang diberikan tersebut akan mendukung sekolah dalam memberikan pelayanan yang tepat, karena itulah sekolah perlu transparan dalam menyampaikan bagaimana kondisi anak yang sebenarnya, serta bagaimana kesanggupan sekolah saat ini dalam memberikan pelayanan pada anak nantinya. Sehingga orang tua juga dapat memahami bagaimana kondisi anak saat ini.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Pada tahap ini, partisipasi orang tua ditampung melalui wadah paguyuban orang tua dan pembelajaran PDBK di rumah. Melalui paguyuban ini orang tua dapat menyumbang ide/pemikiran serta aspirasi sebagai masukan bagi sekolah.

a. Partisipasi dalam Paguyuban Orang Tua Siswa

Paguyuban orang tua siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo didirikan pada tahun 2009. Paguyuban ini mulai beroperasi pada tahun 2010, satu tahun setelah sekolah mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusif. Paguyuban orang tua PDBK dibentuk berdasarkan inisiasi dari wali murid yang memiliki kesadaran akan perlunya dukungan bagi pembelajaran anak berkebutuhan khusus serta sebagai sarana komunikasi bagi sesama orang tua peserta didik berkebutuhan khusus maupun dengan sekolah, sehingga atas dasar ijin dari kepala sekolah dibentuklah suatu komunitas orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang dinamai dengan Paguyuban Orang Tua Siswa Inklusif. Paguyuban ini di awal terbentuknya diurus langsung oleh wali murid, sementara sekolah hanya memegang fungsi kontrol dan fasilitator.

Hal ini sesuai dengan karakteristik yang paling menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan partisipasi para orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat secara kelembagaan adalah dalam dewan sekolah atau komite sekolah, dalam penelitian ini disebut dengan paguyuban orang tua siswa. Menurut Cheng (Nurkolis, 2003:126) terdapat dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. *Pertama*, pendekatan *school-*

based dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. *Kedua*, pendekatan *home-based*, yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama dengan guru yang berkunjung ke rumah (Nurkolis, 2003:126). Jadi, paguyuban merupakan salah satu upaya sekolah dalam memberdayakan orang tua untuk terlibat dalam proses pendidikan di sekolah.

Dilihat dari fungsinya, paguyuban memegang peran sebagai wadah penggalangan dana sukarela orang tua sekaligus sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar seluruh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Jika dilihat dari fungsinya, paguyuban sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun terjadi kevakuman dalam beberapa kegiatannya.

Hal ini tentu sesuai dengan pendapat Lerner dan Johns (2009: 147) yang mengatakan:

“parents support group and family counseling offer the following benefits, they are: (1) Help parents to understand and to accept their child’s problem; (2) Reduce anxieties stemming from apprehension about the psychological and educational development of their child; parents can discover that they are not alone and that other parents have similar problems and have found solutions; (3) Help parent realize that they are an integral part of their child’s learning, development, and behavior; they can learn to perceive their children differently and to deal with their problems more effectively; (4) Help parents learn about discipline, parent advocacy, special education legislation, social skills development, helping one’s child make friends, home management, and college and vocational opportunities.”

Maksud dari pernyataan tersebut adalah, *parents support group* atau kelompok (perkumpulan) orang tua memiliki fungsi untuk membantu memahami dan menerima kondisi anak berkebutuhan khusus. Hal ini merupakan salah satu fungsi paguyuban yaitu sebagai forum komunikasi antar sesama orang tua. Melalui paguyuban tersebut orang tua dapat bertukar pendapat mengenai kebutuhan

anak serta bagaimana mengatasinya. Sehingga orang tua tidak merasa sendiri, karena berada dalam komunitas yang sama.

Hal ini sesuai dengan pendapat Epstein's (2001) yang menyatakan bahwa program partisipasi orang tua yang efektif berfokus pada:

- (1) *Parenting skills to assist parents with understanding their children's learning needs, and helping teachers understand family needs;*
- (2) *Communication that allows for two-way, open communication between the school and home;*
- (3) *Volunteering that recognizes parents' talents and contributions both in and for the school;*
- (4) *Learning at home strategies that engage the family with their children's school work;*
- (5) *Decision making that includes parents as key stakeholders in making decisions that will impact student learning; and*
- (5) *Collaborating with the community to create mutual benefit by sharing resources and contributing to both school and community goals.*

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diidentifikasi bahwa partisipasi orang tua yang efektif dapat memberikan *support* dalam pembelajaran anak melalui konsultasi dan *sharing* dengan sesama anggota komunitas. Selain itu bentuk keterlibatan orang tua dalam paguyuban dapat berupa *support* dana pembelajaran yang diwujudkan dalam sarana belajar maupun bentuk lain. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Booth dan Dunn (Smith, 2004) sebagai berikut:

"Many educators believe that creating a community of families, students, teachers, and school administrators provides additional support for children's learning. Further evidence suggests that academic success may be predicted by the quality of these connections."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kelompok/komunitas orang tua dengan sekolah memberikan dukungan tambahan terhadap pembelajaran peserta didik. Jadi, paguyuban/komunitas orang tua sebenarnya memberikan keuntungan bagi orang tua saja, namun sekolah dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi anak. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa modal/dana maupun tenaga.

Paguyuban sebagai sarana penggalangan dana sukarela, melalui paguyuban orang tua berkumpul dan memberikan sumbangan dana

pembelajaran kepada sekolah yang nantinya digunakan untuk menggaji tiga orang GPK yang statusnya masih honorer. Besarnya sumbangan yang diberikan bebas dan pembayarannya pun fleksibel, satu bulan sekali atau satu semester sekali. Sekolah memang tidak mematok besarnya nominal dana yang diberikan, namun tidak menutup kemungkinan ada orang tua siswa yang memberikan lebih. Hal ini diinisiasi oleh orang tua sendiri yang memiliki kesadaran akan layanan pendidikan yang baik perlu disokong pula dengan pendanaan yang baik, sehingga secara sukarela orang tua memberikan bantuan pendanaan kepada sekolah. Jenis keterlibatan ini termasuk dalam jenis keterlibatan yang berbentuk modal/dana.

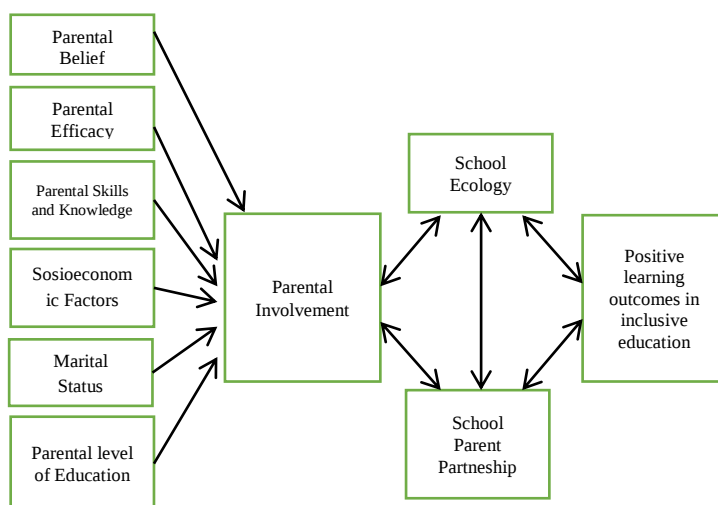
Hal ini sesuai dengan pendapat Mediratta and Fruchter (Henderson dan Mapp, 2002:57) yang memiliki pandangan bahwa komunitas orang tua memberikan keberhasilan yang signifikan dalam beberapa hal, seperti:

- "(1) Upgraded school facilities;*
- (2) Improved school leadership and staffing;*
- (3) Such higher-quality learning programs for students as whole-school reform models;*
- (4) New resources and programs to improve teaching and curriculum, and*
- (5) New funding for after-school programs and family supports."*

Hal ini sesuai dengan fungsi adanya paguyuban orang tua PDBK di SMP Negeri 4 Sidoarjo, yakni membantu sekolah dalam hal pendanaan untuk menggaji GPK. Bentuk keterlibatan ini termasuk dalam keterlibatan melalui modal/pendanaan. Melalui paguyuban diperoleh *income* yang nantinya digunakan untuk menggaji GPK yang saat ini statusnya masih honorer. Dana diperoleh melalui iuran sukarela orang tua PDBK.

Jika dilihat dari kondisi ekonomi dan *background* pendidikan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus, para orang tua tergolong dalam kalangan menengah ke atas. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan kondisi ekonomi dan profesi orang tua yang menyatakan bahwa sebanyak 56,52% orang tua berstatus wiraswasta dan 18,09% sebagai PNS. Menjadikan kondisi sosial ekonomi orang tua berada pada taraf baik. Hal ini melatarbelakangi keterlibatan orang tua terhadap segala program pembelajaran sekolah juga cukup baik. Menurut hasil pengamatan dan data hasil penelitian, terdapat tingkat

antusiasme orang tua yang cukup tinggi, khususnya dalam hal modal (iuran sukarela) yang diinisiasi oleh orang tua sendiri dalam membantu sekolah mendanai kegiatan-kegiatan yang menunjang belajar anak. Demikian juga dengan orang tua dari peserta didik berkebutuhan khusus. Mayoritas di antara mereka merupakan orang tua dengan *background* ekonomi menengah ke atas. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan orang tua dalam membantu sekolah melalui iuran sukarela setiap bulan, serta diwujudkan dengan antusiasme dalam memonitor setiap perkembangan belajar anak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kecenderungan yang besar untuk mengetahui bagaimana pembelajaran anaknya di sekolah. Secara tidak langsung, hal ini akan membantu sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang baik untuk anak berkebutuhan khusus yang nantinya akan menunjang keberhasilan akademik maupun nonakademik siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Afolabi (2014) yang menyatakan keberhasilan akademik siswa berkebutuhan khusus di sekolah dipengaruhi oleh besarnya keterlibatan orang tua di sekolah, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.3 Faktor besarnya keterlibatan orang tua dan efeknya terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus

Sumber: Afolabi (2014)

Gambar tersebut menunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan orang tua, seperti: *parental belief* (kepercayaan orang tua), *parental efficacy*, *parental skills and knowledge* (skil dan pengetahuan orang tua), *socioeconomic factors* (faktor social ekonomi), *mental status* (status social), *parental level of education* (tingkat pendidikan orang tua). Beberapa hal tersebut ikut mempengaruhi besar kecilnya keterlibatan orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Menurut pendapat Afolabi (2014) tersebut, dapat dimengerti bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh sebagaimana peneliti temukan di lapangan adalah faktor sosial ekonomi orang tua PDBK. Teori ini semakin menguatkan bahwa kolaborasi antara orang tua dan sekolah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program pembelajaran yang pada akhirnya, menurut hemat peneliti akan sangat berimplikasi terhadap perkembangan psikologi akademik siswa berkebutuhan khusus. Semakin besar keterlibatan orang tua maka akan semakin positif efek yang diberikan kepada pendidikan anak. Hal ini berdasarkan pendapat Epstein (Smith, 2004) yang menyatakan bahwa partisipasi orang tua yang tinggi berkaitan dengan keberhasilan akademik peserta didik, sebagai berikut:

“A recurring theme in many of these studies is that less educated or poor parents cannot or do not want to become involved in their children's education. Yet, the results of many of these studies also indicate that parents' practices of involvement compensate for less education or less income to benefit children.”

Epstein (Smith, 2004) menyatakan lebih lanjut bahwa banyak penelitian yang menunjukkan, keluarga dengan kondisi ekonomi sosial yang lebih tinggi, serta berpendidikan tinggi akan terlibat dan berinvestasi lebih terhadap pendidikan anaknya, sedangkan sebaliknya orang tua dengan *background* pendidikan yang rendah serta kondisi ekonomi yang rendah akan lebih sedikit terlibat dalam pendidikan anaknya. Terlepas dari masalah latar belakang orang tua sebagai salah satu indikator besar kecilnya keterlibatan mereka, faktor terpenting lainnya bagaimana sekolah dapat melibatkan seluruh orang tua PDBK dalam pengambilan

keputusan bagi anak-anaknya. Menurut pendapat Gargiulo (2012: 132) bahwa, *"Today, parent (family) participation in the educational decision-making process is a right, not a privilege"*. Sehingga dapat dimaknai bahwa kewajiban sekolah untuk melibatkan orangtua selain keinginan keterlibatan datang dari diri orang tua. Karena keterlibatan orang tua akan sangat berakibat positif bagi anak-anaknya serta bagi program pembelajaran yang diberikan (Epstein dalam Smith, 2004).

Selain sebagai sarana penggalangan dana, paguyuban juga merupakan wadah dalam berkomunikasi antar sesama orang tua siswa berkebutuhan khusus. Komunikasi ini ditampung melalui forum orang tua dalam bentuk rapat yang dilakukan enam bulan sekali. Melalui rapat tersebut orang tua dapat menyampaikan masukan-masukan kepada sekolah berkaitan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jenis keterlibatan ini termasuk dalam jenis keterlibatan yang berbentuk ide/pemikiran.

Henderson dan Mapp (2002:47) menyatakan *"involvement at school is most strongly influenced by school practices that encourage volunteering and participation in school decision making."* Hal ini dimaksudkan bahwa bentuk keterlibatan orang tua di sekolah salah satunya adalah orang tua berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan bagian dari keterlibatan dalam bentuk ide/pemikiran, karena dalam pengambilan keputusan tersebut orang tua juga akan berpendapat dan sumbang ide.

Henderson dan Mapp (2002:160-161) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa beberapa studi membuktikan bahwa sebagian besar sekolah meminta pendapat orang tua dalam hal pengambilan keputusan, sebagai berikut:

"Some schools established parent or community liaisons that helped keep parents in touch with the school or parent resource centers that provided workshops, field trips, and information about social services. Although parent involvement in school decision making was mandated by policies in a few schools or districts, the study claimed that most schools took parent perspectives into consideration."

Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah mengikutsertakan

orang tua dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga terjadi di lapangan, yakni orang tua diwadahi aspirasinya dalam sebuah forum konferensi sekolah-orang tua atau yang awam disebut dengan rapat wali murid. Rapat ini berfungsi untuk menyatukan aspirasi dari seluruh orang tua PDBK mengenai program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan, sekaligus sebagai sarana sekolah dalam melaporkan pelaksanaan program pembelajaran selama ini.

Berdasarkan pengamatan peneliti, jika dilihat dari konteks MBS, dapat diidentifikasi transparansi dan akuntabilitas sekolah melalui rapat tersebut. Sesuai pendapat Epstein (Epstein, 1991:11) yang merumuskan terdapat lima tipe keterlibatan yang harus dijalin antara sekolah dan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembelajaran dan perkembangan anak, salah satunya adalah sebagai berikut:

"The schools are responsible for communicating with families about school programs and children's progress. Communications include the notices, phone calls, visits, report cards, and conferences with parents that most schools provide. Other innovative communications include information to help families to choose or change schools and to help families help students select curricula, courses, special programs and activities, and other opportunities at each grade level. Schools vary the forms and frequency of communications and greatly affect whether the information sent home can be understood by all families. Schools strengthen partnerships by encouraging two-way communications."

Rapat/pertemuan wali murid yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua. Dalam rapat tersebut orang tua dapat menanyakan bagaimana progres program yang diberikan kepada anak serta memberikan masukan kepada sekolah. Selanjutnya, pada rapat tersebut sekolah juga menginformasikan program yang ditawarkan pada anak pada saat rapat rutin wali murid. Pada rapat tersebut, orang tua berhak untuk mengajukan usulan untuk program yang akan dilaksanakan di sekolah. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa komunikasi orang tua dengan

sekolah bersifat interaktif dan terjadi timbal balik.

Komunikasi yang terjalin antara sekolah dan paguyuban bersifat interaktif, sehingga penyampaian ide dan pemikiran tentang berbagai kegiatan bersifat komunikatif. Komunikasi yang dilakukan antar sesama orang tua tidak hanya berlangsung secara formal, namun juga tetap dilakukan secara nonformal, yakni secara tidak langsung melalui telepon, sms, atau *whatsapp* dan secara langsung seperti saat *ngobrol* santai sambil menjemput atau mengantar anak mereka di sekolah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh selama di lapangan, komunikasi secara nonformal ini lebih efektif bagi orang tua siswa, terutama saat mengantar dan menjemput siswa di sekolah. Melalui pembicaraan tersebut diperoleh ide maupun usulan bagi sekolah yang nantinya akan dimunculkan saat rapat besar enam bulan sekali.

Hal ini sesuai dengan pendapat Guerin (Carrington dan MacArthur, 2012:234) yang menyatakan bahwa:

“Educational policies do not establish and maintain partnership. It is in the day-to-day interactions of the team members that relationships are supported and developed. Authentic partnerships are supported when we pay attention to issues such as arranging meeting times that do not require people to find extra childcare, ensuring meetings take place somewhere that suits all partners’ need, and establishing regular communication through email, phone calls, or the daily school pick-up or drop-off times.”

Pendapat tersebut dimaknai bahwa aktivitas dalam komunitas orang tua tidak sepenuhnya dibentuk dan dijamin kelangsungannya dalam kebijakan pendidikan di sekolah. Namun dapat terbentuk dan berkembang melalui interaksi antar sesama anggota komunitas melalui kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat didukung melalui pembuatan jadwal pertemuan yang tidak membutuhkan banyak tenaga untuk merawat anak, misalnya memastikan pertemuan berlangsung di tempat yang dibutuhkan oleh seluruh anggota, lalu membangun komunikasi yang biasa dilakukan, seperti komunikasi melalui email, telepon, atau saat mengantar dan menjemput peserta didik di sekolah.

b. Partisipasi dalam Pembelajaran di Rumah

Keterlibatan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran anak tidak hanya berlangsung di sekolah, namun berlangsung sampai di rumah. Justru peran orang tua dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di rumah sangat penting. Bentuk keterlibatannya adalah sebagai pendamping dalam belajar. Pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang berlangsung di rumah merupakan kelanjutan dari pembelajaran di sekolah, maka orang tua perlu mengawal bagaima pembelajaran yang telah diberikan kepada anak. Anak berkebutuhan khusus juga memerlukan adanya pengulangan pembelajaran yang diberikan di sekolah, hal inilah yang membuat orang tua perlu mendampingi anak berkebutuhan khusus saat belajar di rumah. Selain itu, anak masih perlu didampingi dalam mengerjakan tugas rumah, sehingga orang tua perlu mengecek pekerjaan siswa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Finn (Stelmack, 2008: 8) dalam penelitiannya yang menyatakan, bahwa keterlibatan orang tua di rumah memiliki pengaruh yang lebih besar daripada keterlibatan selama di sekolah terhadap performa akademik anak. Lebih jauh Finn menyatakan sebagai berikut:

“Studies indicate that parent involvement at home influences academic performance more strongly than parent involvement at school. Three types of parent involvement at home are consistently related to school achievement: 1) organizing and monitoring children’s time, especially related to television viewing; 2) helping with homework; and 3) discussing school-related issues with children.”

Berdasarkan pendapat tersebut, bentuk keterlibatan orang tua di rumah terhadap anak dapat berupa kontrol aktivitas anak, terutama waktu yang digunakan untuk menonton televisi; membantu anak dalam mengerjakan tugas rumah; dan diskusi dengan anak seputar kegiatan sekolah. Dalam kaitannya dengan pembelajaran di rumah, orang tua dapat terlibat dalam proses belajar anak serta membantu mengatasi kesulitan belajarnya. Orang tua merupakan *partner* sekolah dalam melaksanakan pembelajaran bagi anak.

Esther Ho Sui-Chu and Douglas Willms (Henderson dan Mapp, 2002: 35) yang mengemukakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak di rumah memiliki

dampak positif yang lebih besar dalam pembelajaran anak daripada sekedar menghadiri pertemuan di sekolah sebagai berikut:

“Involvement at home had the greatest effect on student achievement. Compared with volunteering and attending school activities, parents’ talking about school with their children and helping them plan their education programs were more highly related to higher grades and test scores.”

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Loreman (2005: 106) yang menyatakan bahwa *“parents are well placed to act as teacher of their own children as they have the most contact with the child and usually know their interests and abilities better than anyone else”*. Kaitannya dengan pendapat tersebut, anak berkebutuhan khusus memerlukan asistensi dalam melaksanakan tugas belajarnya di rumah, melalui ini orang tua dapat memberikan bantuannya. Selain itu, bagi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, orang tua merupakan orang yang tepat karena orang tua yang paling tahu mengenai anaknya.

Pembelajaran di rumah sebagai kelanjutan dari pembelajaran di sekolah. Karena itulah orang tua berkolaborasi dengan guru/GPK untuk melaksanakan pembelajaran yang tepat selama di rumah. Orang tua aktif berkomunikasi dengan guru/GPK, baik itu sekedar menanyakan tugas rumah siswa berkebutuhan khusus maupun materi yang perlu dipelajari ulang di rumah. Sebagai pendamping dalam pembelajaran anak, selain mendampingi pembelajaran di rumah, orang tua juga berperan dalam mensupport pembelajaran selama di sekolah dengan aktif mengontrol serta melaporkan bagaimana perkembangan belajar anak selama di rumah. Orang tua melaporkan hasil belajar anak di rumah dengan konsultasi ringan dengan guru saat mengantar atau menjemput anak di sekolah. Melalui pelaporan tersebut, guru juga dapat merespon dengan mengamati bagaimana perilaku anak ketika di kelas. Hasil pelaporan orang tua juga menjadikan penilaian tersendiri bagi guru di sekolah. Selain itu guru juga mengingatkan kepada orang tua jika ada materi yang masih belum dikuasai oleh anak berkebutuhan khusus. Guru mengingatkan sambil memberikan materi yang perlu dipelajari kembali di rumah.

Epstein (Epstein, 1991:12) menyatakan hal serupa sebagai berikut:

“Involvement in learning activities at home. Teachers request and guide parents to monitor and assist their own children at home. Teachers assist parents in how to interact with their children on learning activities at home that are coordinated with the children's classwork or that advance or enrich learning. Schools enable families to understand how to help their children at home by providing information on academic and other skills required of students to pass each grade, with directions on how to monitor, discuss, and help with homework and practice and reinforce needed skills.”

Hal ini sesuai dengan prinsip MBS yakni transparansi, artinya perlu adanya keterbukaan antara guru dengan orang tua mengenai perkembangan belajar anak. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dauber dan Epstein (Epstein, 1991:6) yang menyatakan bahwa *“over 90% of parents of elementary and middle grades students believe that the school should tell them how to help at home.”* Pendapat tersebut menunjukkan bahwa orang tua menginginkan guru untuk memberikan informasi berkaitan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam membantu pembelajaran anak di rumah, sehingga harus ada kerjasama dan keterbukaan antara guru dengan orang tua. Dengan mengetahui informasi tersebut, maka orang tua dapat memberikan masukan pada guru dan memberikan pendampingan yang tepat bagi anak saat belajar di rumah.

Hill and Tyson (2009:741) menyatakan bahwa:

“School-based involvement includes visits to school for school events (e.g., PTA meetings, open houses, etc.), participation in school governance, volunteering at school, and communication between parents and school personnel. Then, academic socialization includes communicating parental expectations for education and its value or utility, linking schoolwork to current events, fostering educational and occupational aspirations, discussing learning strategies with children, and making preparations and plans for the future.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa orang tua perlu menjalin komunikasi dengan guru berkaitan dengan perkembangan belajar anak. Orang tua perlu

melaporkan bagaimana perkembangan sikap dan belajar anak di rumah karena hal ini dapat membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap anak. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Loreman (2005:105-106), bahwa peran orang tua dalam sekolah inklusif adalah sebagai pembuat keputusan, orang tua sebagai pembela hak-hak anaknya, dan orang tua sebagai guru. Bagi anak berkebutuhan khusus, peran orang tua sangatlah dibutuhkan, mengingat siswa berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang spesifik dan berbeda dengan siswa yang lainnya, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses pembelajarannya.

Sebagai upaya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di rumah maupun di sekolah, sekolah kerap memberikan saran dalam melaksanakan pembelajaran yang sebaiknya dilakukan di rumah. Hal ini dilakukan oleh GPK maupun guru mata pelajaran dalam memberikan solusi saat orang tua berkonsultasi secara nonformal dengan guru. Sebagai contoh adalah guru memberikan saran diet yang seharusnya dilakukan oleh siswa autis untuk mengurangi tingkat hiperaktifitas di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lareau (Afolabi, 2014) menyatakan: *“...parental involvement is seen as an integration of home and school. This practice encourages parents to participate in the life of the school...”* Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua merupakan gabungan dari dua hal, yakni keterlibatan di rumah dan di sekolah.

Senada dengan pendapat tersebut, Afolabi (2014) menambahkan:

“... a positive learning outcome in inclusive education depends on home-school collaboration for it to be effective and this can be sustained in a positive school climate where parents are seen as collaborators or partners in their child's education.”

Henderson dan Mapp (2002:39) juga berpendapat yang sama sebagai berikut:

“... students made greater and more consistent gains when teachers were “especially active” in outreach to parents. Outreach is defined as: (1) Meeting with parents face to face; (2) Sending materials on ways to help their child at home; (3) Telephoning both

routinely and when their child is having problems”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwasannya pembelajaran yang positif dalam pendidikan inklusif tergantung pada hubungan dan kolaborasi antara orang tua selama di rumah dan di sekolah untuk menjadi efektif dan dapat berdampak pada iklim sekolah yang positif.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo

Orang tua tidak terlibat secara langsung dalam proses evaluasi pembelajaran anak. Sekolah melakukan evaluasi pembelajaran anak melalui ujian tengah semester dan akhir semester bersama-sama dengan siswa reguler lainnya. Sedangkan bentuk keterlibatan orang tua dalam proses evaluasi pembelajaran anak adalah sebatas mengontrol saja melalui komunikasi aktif dan konsultasi dengan guru. Orang tua memiliki kecenderungan untuk selalu ingin tahu bagaimana perkembangan belajar anaknya, karena itulah seringkali orang tua menghubungi guru/GPK melalui telepon atau sms dan bertemu secara langsung untuk sekedar bertanya mengenai bagaimana hasil evaluasi anak berkebutuhan khusus yang telah dilakukan. Komunikasi tersebut dilakukan melalui konsultasi ringan dengan guru maupun GPK saat mengantar dan menjemput anak mereka. Konseling dengan GPK perlu dilakukan karena orang tua berhak mengetahui sejauh mana perkembangan anak di sekolah. Sesuai dengan pendapat Lerner dan Johns (2009: 144) yang merumuskan hak orang tua selama konseling adalah sebagai berikut:

“(1) A free, appropriate public education for their child; (2) Request an evaluation of their child; (3) Notification whenever the school wants to evaluate their child or change the child's education placement; (4) Informed consent (parents understand and agree in writing to teaching plans and many withdraw their consent at any time); (5) Obtain an independent evaluation of their child; (6) Request a reevaluation of their child; (7) Have their child tested in the language that the child knows the best; (8) Review all their child's school records; (9) Participate in their child's individualized education program (IEP) or individualized family service plan (IFSP) for young children; and (10) Be informed of their child's progress at least as often as

parents of children who do not disabilities.”

Maksud dari pernyataan tersebut adalah, selama proses pembelajaran berlangsung orang tua perlu diinformasikan berbagai hal terkait laporan perkembangan anak, program pendidikan yang tepat untuk anak, evaluasi yang diberikan kepada anak, *treatment* yang diberikan, dan semua hal yang berkaitan dengan anak. Hal ini merupakan bagian dari proses monitoring selama proses pembelajaran anak. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan di awal, apakah program pembelajaran yang diberikan tepat bagi anak, serta penempatan bagi anak sudah sesuai atau belum (Direktorat Pembinaan PKLK, 2014: 20).

Dalam hal pembelajaran, orang tua memiliki kecenderungan untuk mengetahui perkembangan belajar anak di sekolah. Hal inilah yang melatarbelakangi keaktifan mereka dalam menjalin komunikasi dengan sekolah guna mengontrol perkembangan belajar anak mereka. Biasanya, orang tua selalu menanyakan kepada guru mengenai bagaimana hasil evaluasi anak berkebutuhan khusus yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan orang tua dalam memonitor perkembangan belajar anak, yakni melalui usaha dalam menjalin komunikasi dengan sekolah untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan tersebut. Komunikasi yang dijalin antara sekolah dengan orang tua dapat berupa komunikasi formal maupun informal. Komunikasi formal terjadi saat rapat dengan wali murid lain, sementara itu komunikasi informal terjadi melalui komunikasi sehari-hari antara orang tua dengan guru saat mengantarkan atau menjemput anak-anak mereka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Epstein dan Henick (1991: 6) sebagai berikut:

“Most parents want to know how to help their children at home and how to stay involved with their children's education. Despite a real decline in teachers' practices to involve parents in the upper grades, parents of children at all grade levels want schools to keep them informed about their children's instructional programs and progress.”

Hal ini sesuai dengan pendapat Grolnick and Slowiaczek (Hill and Tyson, 2009)

“First, behavioral involvement includes both home-based and school-based involvement strategies, such as active connections and communication between home and school, volunteering at school,

and assisting with homework. Second, cognitive-intellectual involvement reflects home-based involvement and includes parental role in exposing their children to educationally stimulating activities and experiences. Finally, personal involvement includes attitudes and expectations about school and education and conveying the enjoyment of learning, which reflects parental socialization around the value and utility of education.”

Sekolah juga tidak tinggal diam menyambut antusias orang tua tersebut. Usaha sekolah dalam menjaga komunikasi dengan orang tua melalui fasilitasi dalam konsultasi rutin pembelajaran siswa berkebutuhan khusus bagi orang tua yang menginginkan. Sekolah juga aktif dalam memberikan informasi bagaimana perkembangan pembelajaran anak di sekolah, serta menjalin komunikasi secara tidak langsung melalui telepon maupun sms personal dengan guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Gargiulo (2012:177) yang menyatakan bahwa, *“Parents want to be informed. When a student does not do well on an assignment or seems to fall behind in class, contact the parents via e-mail, phone, or note or in person to inform them of their child's progress or any concerns”*. Ia menekankan tentang pentingnya komunikasi aktif antara keduanya dalam memonitor keberadaan anak selama proses pembelajaran. Bahkan, ia mencontohkan hal simpel seperti komunikasi melalui email atau telepon tentang kemampuan anak mengerjakan tugas, atau bahkan saat anak terjatuh di lingkungan sekolah.

Adapun untuk program pembelajaran secara keseluruhan, sekolah melaporkan melalui rapat rutin yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali yang berbarengan dengan rapat paguyuban. Dalam rapat tersebut orang tua dapat menanyakan bagaimana progres program yang diberikan kepada anak serta memberikan masukan kepada sekolah. Selanjutnya, pada rapat tersebut sekolah juga menginformasikan program yang ditawarkan pada anak saat rapat rutin wali murid. Pada rapat tersebut, orang tua berhak untuk mengajukan usulan untuk program yang akan dilaksanakan di sekolah. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan orang tua dalam jenis ide/masukan. Pihak yang terlibat dalam rapat rutin yang dilaksanakan sekolah setiap enam bulan sekali adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, koordinator pendidikan inklusif, GPK, dan orang tua siswa berkebutuhan khusus.

Hal ini berkaitan dengan pendapat Epstein (Epstein, 1991:11) merumuskan terdapat lima tipe

keterlibatan yang harus dijalin antara sekolah dan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembelajaran dan perkembangan anak, salah satunya adalah sebagai berikut:

"The schools are responsible for communicating with families about school programs and children's progress. Communications include the notices, phone calls, visits, report cards, and conferences with parents that most schools provide. Other innovative communications include information to help families to choose or change schools and to help families help students select curricula, courses, special programs and activities, and other opportunities at each grade level. Schools vary the forms and frequency of communications and greatly affect whether the information sent home can be understood by all families. Schools strengthen partnerships by encouraging two-way communications."

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu upaya sekolah dalam menjalin komunikasi dengan orang tua adalah dengan melaporkan program pembelajaran yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui rapat wali murid. Hal ini dimaknai bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan dan melaporkan perkembangan program pembelajaran yang dilaksanakan. Sesuai dengan konteks sekolah yang melaksanakan MBS, maka perlu diterapkannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Nurkolis (2003:88) menyatakan, transparansi yang diberikan pada sekolah juga menuntut kejelasan tugas dan tanggung-jawab masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dituntut dalam penggunaan anggaran belanja sekolah, tetapi juga dalam hal penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Partisipasi orang tua dalam proses perencanaan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 4 Sidoarjo memiliki dampak psikologis terhadap perkembangan belajar anak, orang tua terlibat penuh dalam serangkaian kegiatan perencanaan pembelajaran, *pertama* dalam bentuk tenaga, yaitu pendampingan pada tahap identifikasi

psikologis peserta didik berkebutuhan khusus di psikolog Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo. *Kedua* dalam bentuk ide/pemikiran, yaitu seluruh informasi yang diberikan selama wawancara pada proses asesmen awal di sekolah. Partisipasi orang tua ini didukung adanya keterbukaan sekolah melalui sosialisasi kepada wali murid mengenai pendidikan inklusif, bentuk program pembelajaran, serta bagaimana evaluasi PDBK sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap kerjasama orang tua dalam memberikan informasi berkaitan PDBK dan penyamaan *mindset* antara sekolah dengan orang tua; (2) Partisipasi orang tua dalam proses pelaksanaan pembelajaran PDBK diwujudkan dalam beberapa bentuk, *pertama* melalui Paguyuban Orang Tua Inklusif, yaitu diwujudkan dalam kegiatan pendanaan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang dialokasikan untuk gaji GPK dan keaktifan serta ide/pemikiran yang diberikan dalam rapat rutin yang dilaksanakan selama enam bulan sekali dalam membahas program pembelajaran yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Transparansi dan akuntabilitas sekolah diwujudkan dalam pelaporan sekolah melalui rapat wali murid enam bulan sekali. *Kedua*, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah yang diwujudkan melalui kegiatan pendampingan selama belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Transparansi sekolah diwujudkan melalui keterbukaan guru dalam menerima masukan dari orang tua saat berkonsultasi.; (3) Partisipasi orang tua dalam evaluasi program pembelajaran PDBK juga terlihat pada monitoring pembelajaran yang dilakukan orang tua melalui konseling dengan guru, serta rapat evaluasi yang dilakukan enam bulan sekali berbarengan dengan rapat rutin wali murid. Orang tua memiliki kecenderungan yang besar untuk mengetahui bagaimana perkembangan belajar anaknya, sehingga orang tua begitu aktif dalam berkomunikasi dengan guru mapel maupun GPK. Bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah diwujudkan melalui pelaporan saat rapat dan keterbukaan dalam memberikan informasi perkembangan anak; dan (4) Besarnya keterlibatan orang tua terhadap pembelajaran anak perlu ditunjang adanya keterbukaan dan akuntabilitas dari sekolah. MBS merupakan prasyarat utama yang harus ada dalam sebuah sekolah inklusif, karena keterlibatan dari orang tua juga membutuhkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dari sekolah, yang kesemuanya itu jika tidak dikelola dengan baik tidak akan terlaksana dengan maksimal

pula. Di sisi lain, konsep keterlibatan orang tua dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah inklusif sangat tepat dilaksanakan dalam sekolah yang menerapkan MBS, artinya sekolah perlu melibatkan orang tua dalam seluruh aspek pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasinya.

2. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi sekolah yang dijadikan tempat penelitian (SMP Negeri 4 Sidoarjo) dan pihak lain yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

Bagi sekolah;

(a) kepala sekolah hendaknya menyusun kebijakan mengenai keterlibatan yang mewajibkan seluruh orang tua PDBK agar lebih aktif dalam mengawal pembelajaran PDBK, seperti kewajiban mengikuti rapat perencanaan program pembelajaran PDBK, kewajiban untuk aktif dalam forum rapat wali murid dan seluruh kegiatan anak, serta melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan; (b) guru dan tim pendidikan inklusif sekolah hendaknya lebih intens berinteraksi dengan orang tua sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi orang tua PDBK dalam mensukseskan jalannya program pembelajaran, utamanya pada tahap pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran siswa. Tim pendidikan inklusif perlu menjalin kerjasama dengan orang tua dalam proses pembelajaran PDBK di dalam kelas, seperti pelibatan orang tua dalam program vokasional di sekolah. Selain itu, guru perlu berkolaborasi dengan orang tua dalam memberikan metode belajar yang tepat diterapkan di rumah maupun di sekolah; (c) sekolah hendaknya terbuka terhadap setiap informasi dan masukan orang tua dengan menyediakan kotak saran sekolah dan melaporkan program sekolah beserta penggunaan anggarannya kepada orang tua melalui papan informasi sehingga bisa diakses secara bebas oleh orang tua siswa; (d) sekolah hendaknya lebih mengaktifkan program paguyuban, misalnya melalui pertemuan wali murid dalam jangka waktu yang lebih singkat, yakni satu bulan sekali sehingga orang tua bisa lebih aktif berkomunikasi dengan sekolah maupun dengan sesama orang tua; (e) sekolah hendaknya memberdayakan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tidak hanya melalui ide/pemikiran dan pendanaan. Sebelumnya sekolah perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi pada

orang tua sebagai upaya peningkatan kompetensi dan pemahaman orang tua tentang keinklusi; (f) hendaknya dibuatkan buku penghubung antara sekolah dengan orang tua PDBK yang isinya mengenai perkembangan belajar siswa serta memungkinkan adanya *feedback* orang tua yang bisa ditindaklanjuti dengan pemberian masukan mengenai pemberian *treatment* yang lebih tepat bagi anak. Buku penghubung ini bisa menjadi sarana komunikasi orang tua dengan guru, serta menuntun orang tua untuk melaksanakan pembelajaran yang tepat di rumah; dan (g) hendaknya dibuat sebuah program berupa *group discuss* orang tua PDBK dan sekolah yang dapat dijadwalkan minimal dua minggu sekali untuk membicarakan *progress* pembelajaran anak. Melalui pertemuan ini nanti dapat terjadi kesinambungan antara sekolah dengan orang tua, serta dapat memberikan pengetahuan kepada orang tua dalam melakukan pembelajaran di rumah. Pertemuan ini juga sekaligus memberikan masukan kepada sekolah selama melaksanakan program pembelajaran, bukan setelah program pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Bagi orang tua;

(a) Orang tua hendaknya lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan sesama orang tua, misalnya dengan mengadakan kegiatan kumpul bersama dengan sesama orang tua yang bisa dijadwalkan beberapa bulan sekali yang fungsinya untuk menjalin silaturahmi dan *sharing* dengan sesama orang tua PDBK.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Shofa Rofiqil. 2007. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah (Studi di MI Manbaul Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Abu Dohou, Ibtisam. 2002. *School Based Management* (terjemahan). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Afolabi, Olusgen Emmanuel. 2014. *Parents' Involvement in Inclusive Education: An Empirical Test for the Psycho-educational Development of Learners with Special Educational Needs (SENs)*. Vol. 6, No. 10, Desember 2014. International Journal of Educational Administration and Policy Studies. Tersedia: <http://www.academicjournals.org/IJEA> PS. Diakses tanggal 27 Juni 2015.
- Bafadal, Ibrahim. 2008. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budiyanto. 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Depdiknas

- Bullock, A. dan H. Thomas. 1997. *School at the Centre? A Study of Decentralization*. London: Routledge
- Caldwell, Brian J. 2005. *School-based Management*. Ebook. [Online]. Tersedia: <http://www.unesco.org/iiep>. Diakses pada 16 Mei 2015
- Cheng, Y. Cheong. 2001. *New Vision of School-Based Management: Globalization, Localization, and Individualization*.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004b. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
- Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemdikbud
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa
- Dispenprov Jatim. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jawa Timur: Disdik Jatim
- Epstein, J. 1995. *School/Family/Community Partnerships: Caring for the Children We Share*. Phi Delta Kappan
- Fattah, Nanang. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Fattah, Nanang dan Ali, Mohammad. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Halinger, P., Murphy, J., and Hausman, C. 1993. *Conceptualizing School Restructuring: Principals' and Teachers' Perceptions*. In C. Dim Mock (Ed.), *School-Based Management and School Effectiveness*. London: Routledge
- Henderson, Anne T. dan Mapp, Karen L. 2002. *A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement*. United States: National Center for Family and Community Connections with Schools SEDL
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Imron, Ali. 2013. *Rencana Kerja Sekolah*. Materi Bintel MBS. Malang: Universitas Negeri Malang
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Adicita
- Kemdikbud. 2014. *Kurikulum 2013: Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 2013 Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Reguler*. Jakarta: Dit. PPKLK Dikdas
- Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah
- Lerner, Janet dan Johns, Beverly. 2009. *Learning Disabilities and Related Mild Disabilities: Characteristics, Teaching Strategies, and New Directions*. Eds. 11. United States of America: Wadsworth, Cengage Learning
- Loefer, Tim, et al. 2005. *Inclusive School: a practical guide to supporting diversity in the classroom*. Singapore: South Wind Productions
- Lutfiyah, Mita. 2013. *Peran Masyarakat dalam Memajukan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Malik, Halim. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*. (Kompas, 2/5/11) Hardiknas-Rangkat
- Minarti, S. 2011. *Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mudjito, Harizal, dan Elfindri. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsepsi dan Penerapan*. Jakarta: Kemdikbud
- Mulyasa, E. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mutmainah, Ade Faizatul. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Al-Mukhlisin Ciseeng Bogor*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Nurbaati, Fransisca Sri Katon. 2008. *Peran Masyarakat Melalui Humas di SMA Negeri 8 Surabaya*. Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
- Nurkolis, 2003. *Manaj. Berbasis Sekolah, Teori, Model & Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nurkolis. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo
- Olsen, H. 2002. *Makalah: Education for All*. Lombok: Depdiknas
- O'Neil. 1994. *Can Inclusion Work? A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin*. Boston: Educational Leadership
- Oswald, Lori Jo. 1995. *School-Based Management*. [Online]. Tersedia: <https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/3320/digest099.pdf?sequence=1>. Diakses pada 16 Juni 2015
- Pantjastuti, Renani Sri, dkk. 2008. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Jogjakarta: Hikayat Publishing
- PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
- Permendiknas No. 70 Th. 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Depdiknas
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Daerah/Kabupaten Nomor 15 Tahun 2006
- Rusman. 2011. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Smith, J. David. 2013. *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Smith, Jane Graves. Tahun. *Parental Involvement in Education Among Low-Income Families: A Case Study*. Vol. 16, No. 1, (edisi). The School Community Journal. Tersedia: alamat. Diakses tanggal 27 Juni 2015
- Stelmack, Bonnie. 2008. *Parental Involvement: A Research Brief for Practitioners*. Literature Synopsis. University of Alberta. [Online]. Tersedia: <http://eric.ed.gov>. Diakses pada 1 Juli 2015
- Stubbs, Sue. 2002. *Inclusive Education: Where There Are Few Resources*. Ebook. The Atlas Alliance. [Online]. Tersedia: www.eenet.org.uk. Diakses pada 15 Juli 2015
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujanto, Bedjo. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah Era Otonomi Daerah*. Jakarta: CV Sugeng Seto
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan Kedelapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suwandi. 2006. *Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kediri Jawa Timur*. Tesis. Surabaya: Pascasarjana Univ. Negeri Surabaya
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Volansky, Ami dan Friedman, Isaac A. 2003. *School-Based Management: An International Perspective*. Publication Departement, Ministry of Education Jerusalem, Israel: Scorpio 88